

PROPOSAL PENELITIAN DOSEN



Pengaruh Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Angkatan Kerja dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Bangka Belitung

Oleh :

Dr. Budi Permana

Zulpahmi, SE, M.Si

Dhea Suntingarum

Mutiara Yusnidar



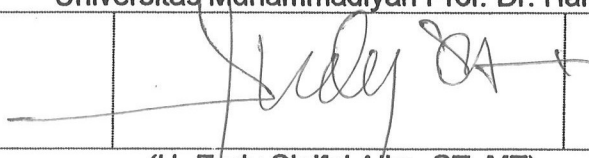
Maya Siti Damayanti

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

2011

HALAMAN PENGESAHAN

1.	Judul Penelitian	:	Pengaruh Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Angkatan Kerja dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Bangka Belitung			
2.	Bidang Penelitian	:	Ekonomi			
3.	Ketua Peneliti	:				
	a. Nama Lengkap	:	Dr. Budi Permana			
	b. Jenis Kelamin	:	Laki-laki			
	c. NIP/NPD	:				
	d. Disiplin Ilmu	:	Manajemen			
	e. Pangkat/Golongan	:				
	f. Jabatan	:	Dosen Tetap			
	g. Fakultas/Jurusan	:	Ekonomi/ Manajemen			
	h. Alamat	:	Jln. Raya Bogor Km 23 Pasar Rebo			
	i. Telepon/Faks/E-mail	:	(021) 87798778			
	j. Alamat Rumah	:	Jl. Poncol Raya No.10 Jakarta Selatan			
	k. Telepon/Faks/E-mail	:	082118498628			
4.	Jumlah Anggota Peneliti	:				
	a. Nama Anggota I	:	Zulfahmi, SE, M.Si			
	b. Nama Anggota II	:	Dhea Suntingarum			
	c. Nama Anggota III	:	Mutia Yusridar			
	d. Nama Anggota IV	:	Maya Siti Damayanti			
5.	Lokasi Penelitian	:	Bangka Belitung			
6.	Jumlah biaya yang diusulkan	:	Rp. 17.000.000.-			
			Jakarta,	13 Oktober	201	1
Mengetahui, Dekan FE UHAMKA				Ketua Peneliti,		
 (H. Ahmad Subaki, SE.Ak, MM) NIP/ NPD 98.0378				 (Dr. Budi Permana)		
		Menyetujui,				
		Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka,				
 (H. Endy Sjaiful Alim, ST, MT)						

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	
DAFTAR ISI	
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
BAB II. PERUMUSAN MASALAH	
2.1. Perumusan Masalah	5
BAB III. TINJAUAN PUSTAKA	
3.1. Pertumbuhan Ekonomi	6
3.2. Angkatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi	7
3.3. Modal Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi	8
3.4. Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi	13
3.5. Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi	16
3.6. Kerangka Pemikiran Teoritis	18
3.7. Hipotesa	19
BAB IV. TUJUAN PENELITIAN	
4.1. Tujuan Penelitian	20
BAB V. METODOLOGI PENELITIAN	
5.1. Definisi Operasional Variabel	21
5.2. Jenis dan Sumber Data	22
5.3. Metode Pengumpulan Data	22
5.4. Teknik Analisis Data	23
BAB VI. JADWAL PENELITIAN	
6.1. Jadwal Penelitian	27
BAB VII. PERSONALIA PENELITIAN	28
BAB VIII. BIA YA PENELITIAN	29
DAFTAR PUSTAKA	30

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan dari pembangunan ekonomi Indonesia adalah terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Pengertian adil dan makmur ini sebenarnya relatif, sehingga sulit dikuantifikasikan secara definitif. Pertumbuhan ekonomi yang mantap (*steady growth*) dengan hasil pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan bukannya segolongan elit masyarakat saja, merupakan dua hal yang amat dikehendaki (Soelistyo, dkk, 1981).

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, pemerataan pembagian pendapatan, meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah atau wilayah dan mengupayakan terjadinya pergeseran kegiatan ekonomi yang semula dari sektor primer, yaitu sektor yang bergantung pada jenis lapangan usaha pertanian serta pertambangan dan penggalian kepada sektor sekunder (lapangan usaha industri pengolahan, listrik, gas dan air minum, konstruksi atau bangunan) serta sektor tersier (lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran, angkutan dan komunikasi, bank/lembaga keuangan, perusahaan persewaan, jasa pemerintahan dan jasa swasta).

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat yang disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Menurut Sukirno (2004) dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara/daerah.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumberdaya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, Kabupaten/Kota untuk bertindak sebagai “motor” sedangkan pemerintah Propinsi sebagai koordinator mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah adalah proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri - industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru (Arsyad, 2005).

Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi nasional atau wilayah adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Sehingga pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. Tanpa adanya pertumbuhan ekonomi, maka pembangunan ekonomi kurang bermakna. Pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan untuk meningkatkan kekayaan suatu negara atau wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi salah satu tujuan utama dari pembangunan suatu negara atau wilayah.

Pertumbuhan ekonomi menurut Soubbotina dan Sheram (2000) selain meningkatkan kekayaan suatu negara juga berpotensi untuk menurunkan kemiskinan dan mengatasi permasalahan-permasalahan sosial lainnya.

Paul A. Samuelson (1996) mendefinisikan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah menunjukkan adanya perluasan atau peningkatan dari GDP potensial atau output dari suatu negara. Ada empat faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi: (a) Sumber Daya Manusia, (b) Sumber Daya Alam, (c) Pembentukan Modal, (d) Perubahan Teknologi dan Inovasi Menurut Todaro (2000) ada tiga faktor atau komponen utama yang harus terpenuhi dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa. Ketiga factor tersebut adalah: (1) akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia (2) pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja (3) kemajuan teknologi.

Akumulasi modal atau investasi akan sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai pada suatu daerah/negara. Besar kecilnya pembentukan akumulasi modal atau investasi pada suatu daerah/negara akan mempengaruhi tingkat permintaan agregat yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat output/produk yang dihasilkan. Meningkatnya output akibat dari permintaan agregat tersebut tentunya akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Akumulasi modal, selain dari pihak swasta, juga diperoleh dari pemerintah daerah dalam bentuk pengeluaran pemerintah daerah yang tersusun dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Besar kecilnya pengeluaran pemerintah daerah juga akan mempengaruhi permintaan agregat yang akan mempengaruhi tingkat output/produk.

Selain akumulasi modal akhir-akhir ini sumber daya manusia menjadi perhatian yang sangat serius bagi pemerintah pusat maupun daerah. Peningkatan mutu sumber daya manusia ini dibuktikan dengan meningkatnya nilai indeks pembangunan manusia (IPM). Perhatian terhadap sumber daya manusia dilakukan setelah teori-teori tentang investasi dan kapital mulai mengalami perubahan

setelah terbukti bahwa sumber daya manusia memainkan peranan paling vital dalam pembangunan ekonomi. Banyak Negara industri maupun negara industri baru memusatkan perhatiannya pada investasi sumber daya manusia karena terbukti merupakan faktor yang signifikan.

Dari paparan di atas penulis merasa tertarik untuk mengkaji sejauh mana pengaruh realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), angkatan kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Bangka Belitung pada tahun 2007 – 2010.

BAB II

PERUMUSAN MASALAH

2.1 Perumusan Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah dengan fokus pembangunan lebih diletakkan pada daerah Kabupaten/Kota maka sangat menarik untuk mengkaji faktor-faktor apa yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu indikator yang digunakan adalah PDRB. Oleh karena itu untuk mengkaji pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung dapat diamati dari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Propinsi Bangka Belitung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi Propinsi Bangka Belitung relatif tumbuh di bawah angka pertumbuhan ekonomi nasional dan relatif lambat dibanding dengan propinsi-propinsi lain di Jawa. Beberapa factor yang nampaknya berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Bangka Belitung adalah faktor realisasi nilai penanaman modal dalam negeri (PMDN), angkatan kerja dan pengeluaran pemerintah . Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pertanyaan penelitian yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh realisasi nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Bangka Belitung?
2. Bagaimana pengaruh jumlah angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Bangka Belitung?
3. Bagaimana pengaruh jumlah pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi Bangka Belitung?

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2000). Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dari suatu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh penambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka.

Menurut Arsyad (1999) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/ Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting guna menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi suatu negara.

"pertumbuhan" (*growth*) tidak identik dengan "pembangunan" (*development*) Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu syarat dari banyak syarat yang diperlukan dalam proses pembangunan (Meier, 1989). Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedang pembangunan berdimensi lebih luas.

Salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada "proses", karena mengandung

unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu pemahaman indikator pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisa sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian domestik dapat dinilai efektifitasnya.

3.2 Angkatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro (2000) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan Angkatan Kerja (AK) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Meski demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat benar akan memberikan dampak positif atau negatif dari pembangunan ekonominya.

Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan pertambahan tenaga kerja tersebut. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya input dan faktor penunjang seperti kecakapan manajerial dan administrasi.

Dalam model sederhana tentang pertumbuhan ekonomi, pada umumnya pengertian tenaga kerja diartikan sebagai angkatan kerja yang bersifat homogen. Menurut Lewis, angkatan kerja yang homogen dan tidak terampil dianggap bisa bergerak dan beralih dari sektor tradisional ke sektor modern secara lancar dan dalam jumlah terbatas. Dalam keadaan demikian penawaran tenaga kerja mengandung elastisitas yang tinggi. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja (dari sektor tradisional) bersumber pada ekspansi kegiatan sektor modern. Dengan demikian salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja.

Menurut Nicholson W. (1991) bahwa suatu fungsi produksi suatu barang atau jasa tertentu (q) adalah $q = f(K, L)$ dimana k merupakan modal dan L adalah

tenaga kerja yang memperlihatkan jumlah maksimal suatu barang/jasa yang dapat diproduksi dengan menggunakan kombinasi alternatif antara K dan L maka apabila salah satu masukan ditambah satu unit tambahan dan masukan lainnya dianggap tetap akan menyebabkan tambahan keluaran yang dapat diproduksi.

Tambahan keluaran yang diproduksi inilah yang disebut dengan produk fisik marjinal (Marginal Physical Product). Selanjutnya dikatakan bahwa apabila jumlah tenaga kerja ditambah terus menerus sedang faktor produksi lain dipertahankan konstan, maka pada awalnya akan menunjukkan peningkatan produktivitas namun pada suatu tingkat tertentu akan memperlihatkan penurunan produktivitasnya serta setelah mencapai tingkat keluaran maksimal setiap penambahan tenaga kerja akan mengurangi pengeluaran.

Payaman J. Simanjuntak (1985) menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan dan melakukan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Menurut BPS penduduk berumur 10 tahun ke atas terbagi sebagai Angkatan Kerja (AK) dan bukan AK. Angkatan Kerja dikatakan bekerja bila mereka melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 (satu) jam secara kontinu selama seminggu yang lalu. Sedangkan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan disebut menganggur (Budi Santosa, 2001) Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang tersedia maka akan menyebabkan semakin meningkatkan total produksi di suatu daerah.

3.3 Modal Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi

Modal manusia dalam terminologi ekonomi sering digunakan untuk untuk bidang pendidikan, kesehatan dan berbagai kapasitas manusia lainnya yang ketika bertambah dapat meningkatkan produktivitas. Pendidikan memainkan peran kunci dalam hal kemampuan suatu perekonomian untuk mengadopsi teknologi modern dan dalam membangun kapasitasnya bagi pembangunan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Kesuksesan dalam pendidikan bergantung juga pada kecukupan

kesehatan. Disamping itu kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Dengan demikian kesehatan dan pendidikan dapat juga dilihat sebagai komponen vital dalam pertumbuhan dan pembangunan sebagai input bagi fungsi produksi agregat (Todaro, 2002).

Menurut Mill pembangunan ekonomi sangat tergantung pada dua jenis perbaikan, yaitu perbaikan dalam tingkat pengetahuan masyarakat dan perbaikan yang berupa usaha-usaha untuk menghapus penghambat pembangunan seperti adat istiadat, kepercayaan dan berpikir tradisional. Perbaikan dalam pendidikan, kemajuan dalam ilmu pengetahuan, perluasan spesialisasi dan perbaikan dalam organisasi produksi merupakan faktor yang penting yang akan memperbaiki mutu dan efisiensi faktor-faktor produksi dan akhirnya menciptakan pembangunan ekonomi. Menurut Mill, faktor pendidikan melaksanakan dua fungsi yaitu: mempertinggi pengetahuan teknik masyarakat dan mempertinggi ilmu pengetahuan umum. Pendidikan dapat menciptakan pandangan-pandangan dan kebiasaan modern dan besar perannya untuk menentukan kemajuan ekonomi masyarakat.

Menurut Mankiw (2003) modal manusia adalah pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh oleh para pekerja melalui pendidikan mulai dari program untuk anak-anak sampai dengan pelatihan dalam pekerjaan (*on the job training*) untuk para pekerja dewasa. Seperti halnya dengan modal fisik, modal manusia meningkatkan kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa. Untuk meningkatkan level modal manusia dibutuhkan investasi dalam bentuk guru, perpustakaan dan waktu belajar.

Sementara itu untuk menyesuaikan dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, negara-negara berkembang harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia, dengan mewujudkan program-program spesifik yakni (Samuelson dan Nordhaus, 2005) :

1. Mengendalikan penyakit serta meningkatkan kesehatan dan nutrisi.

Meningkatkan standar kesehatan penduduk menyebabkan peningkatan produktivitas mereka sebagai tenaga kerja. Pusat kesehatan masyarakat dan penyediaan air bersih merupakan modal sosial yang bermanfaat.

2. Meningkatkan pendidikan, menurunkan angka buta huruf dan melatih tenaga kerja.

Manusia terdidik merupakan tenaga kerja yang lebih produktif karena mampu menggunakan modal secara lebih efektif, mampu mengadopsi teknologi dan mampu belajar dari kesalahan.

3. Di atas semua itu, tidak boleh mengestimasi secara lebih rendah (*under estimate*) terhadap pentingnya sumberdaya manusia.

Becker (1993) mengemukakan bahwa teori modal manusia telah menjadi pemikiran banyak pihak sejalan dengan berhasilnya umat manusia mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk, menanggapi kekhawatiran Malthus akan adanya bencana bagi umat manusia bila penduduk terus bertambah. Teori modal manusia pada dasarnya membahas proses merumuskan bentukbentuk investasi yang bisa ditanamkan kepada manusia, sebab manusia diakui sebagai salah satu sumberdaya yang diperlukan dalam kegiatan produksi barang dan jasa dalam perekonomian.

Samuelson dan Nordhaus (2005) menyebutkan bahwa input tenaga kerja terdiri dari kuantitas dan keterampilan tenaga kerja. Banyak ekonomi percaya bahwa kualitas input tenaga kerja yakni keterampilan, pengetahuan dan disiplin tenaga kerja merupakan elemen paling penting dalam pertumbuhan ekonomi.

Suatu negara yang mampu membeli berbagai peralatan canggih tapi tidak mempekerjakan tenaga kerja terampil dan terlatih tidak akan dapat memanfaatkan barang-barang modal tersebut secara efektif. Peningkatan melek huruf, kesehatan dan disiplin serta kemampuan menggunakan komputer sangat meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Kubo dan Kim (1996) mengemukakan bahwa elemen pokok dari teori pertumbuhan Neo Klasik dapat diringkas sebagai berikut :

1. Bahwa pendapatan perkapita suatu negara tumbuh pada tingkat perkembangan teknologi yang *given* dari luar (eksogen)
2. Bahwa pendapatan perkapita negara-negara miskin cenderung tumbuh pada tingkat yang tinggi jika hal-hal lain tetap (konvergen).

Dalam perkembangannya model Neo Klasik dikritik oleh Model Pertumbuhan Endogen, yang diawali oleh Romer (1986) dan Lucas (1988) yang

mengasumsikan tingkat pengembalian yang konstan atau meningkat terhadap modal. Teori Pertumbuhan Endogen membangun komponen endogen perkembangan teknologi sebagai bagian integral dari teori pertumbuhan. Teori ini juga berusaha menjelaskan observasi yang berbeda terhadap pendapatan per kapita berbagai negara dimana model Neo Klasik gagal ditetapkan. Faktor-faktor seperti modal manusia dan pengeluaran riset dan pengembangan digabungkan sebagai komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dalam model itu .

Lucas (1988) berargumen bahwa akumulasi modal manusia melalui investasi (misal meningkatkan waktu belajar) mendorong pertumbuhan endogen. Argumentasinya menekankan pada keuntungan yang disebabkan oleh eksternalitas dari modal manusia yang cenderung meningkatkan tingkat pengembalian modal manusia. Romer (1990) menyebutkan bahwa modal manusia merupakan input kunci pokok untuk sektor riset karena menyebabkan ditemukannya produk baru/ ide yang disadari sebagai pendorong perkembangan teknologi. Dengan demikian, negara-negara dengan stok awal modal manusia yang lebih tinggi, ekonominya tumbuh lebih cepat. Dengan demikian modal manusia disadari merupakan sumber pertumbuhan yang penting dalam teori pertumbuhan endogen (Kubo dan Kim, 1996).

Bank Dunia (1991) mengemukakan bahwa terdapat tiga alternatif pola pertumbuhan :

1. Pola I, Pertumbuhan yang Tidak Berkesinambungan : pada pola ini ekonomi tumbuh pada beberapa fase pertumbuhan yang pesat, namun tingkat pertumbuhannya menurun, stagnan atau hampir stagnan.
2. Pola II, Pertumbuhan yang Terdistorsi yang ditandai dengan resiko kerusakan sumberdaya alam, kurangnya investasi dalam modal manusia dan subsidi untuk modal fisik.
3. Pola III, pertumbuhan yang berkesinambungan melalui akumulasi aset yang tidak terdistorsi atau seimbang, dengan dukungan publik terhadap pengembangan pendidikan primer dan sekunder, perbaikan kesehatan public dan perlindungan alam.

Pertumbuhan dalam modal fisik bisa saja melimpah ke modal manusia melalui investasi swasta dalam riset dan pengembangan serta pelatihan dalam teknologi yang lebih tinggi yakni dalam pertumbuhan yang didorong oleh teknologi. Untuk dapat melestarikan pertumbuhan angkatan kerja sebagian besar (dan semakin meningkat besarnya) harus memiliki latar belakang sekolah umum yang cukup supaya dapat menguasai keterampilan teknologi serta berpartisipasi dalam perluasan aktivitas riset dan pengembangan. Oleh karena itu sekolah umum yang disediakan secara publik dan pengetahuan yang dihasilkan secara privat bersifat komplementer.

Ranis dan Gustav (2000) mengemukakan bahwa pembangunan manusia secara luas didefinisikan sebagai mengusahakan orang-orang untuk menjalani hidup lebih lama, lebih sehat dan lebih penuh. Secara sempit, pembangunan manusia diinterpretasikan sebagai refleksi dari status kesehatan dan pendidikan manusia.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan hubungan dua arah yang kuat. Di satu sisi pertumbuhan ekonomi menyediakan sumber-sumber yang memungkinkan terjadinya perkembangan secara berkelanjutan dalam pembangunan manusia. Sementara sisi lain pengembangan secara berkelanjutan dalam kualitas modal manusia merupakan kontributor penting bagi pertumbuhan ekonomi.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia berlangsung melalui penciptaan lapangan kerja. Aspek ini sangat penting karena sesungguhnya penciptaan lapangan kerja merupakan jembatan utama yang mengaitkan antara keduanya (UNDP,1996) Hubungan atas-bawah antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia menunjukkan bahwa melalui upaya pembangunan manusia berkemampuan dasar dan berketerampilan. Tenaga kerja termasuk petani, pengusaha dan manajer akan meningkat. Selain itu pembangunan manusia akan mempengaruhi jenis produksi domestik, kegiatan riset dan pengembangan teknologi yang pada akhirnya mempengaruhi komposisi output dan ekspor suatu negara. Kuatnya hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia akan juga dipengaruhi oleh

faktor-faktor kelembagaan pemerintah, distribusi sumber daya swasta dan masyarakat, modal sosial, lembaga swadaya masyarakat dan ormas. Faktor-faktor kelembagaan pemerintah jelas peranannya karena keberadaanya sangat menentukan implementasi kebijakan publik. Faktor distribusi sumber daya juga jelas karena tanpa distribusi sumber daya yang merata (misal dalam penguasaan lahan atau sumber daya ekonomi lainnya) hanya akan menimbulkan frustrasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan terhadap sistem dan perilaku pemerintah. Semua faktor-faktor tersebut berperan sebagai katalisator bagi berlangsungnya hubungan timbal balik antara keduanya secara efisien.

3.4 Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai "pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan".

Menurut Boediono (1992) investasi adalah pengeluaran oleh sector produsen (swasta) untuk pembelian barang dan jasa untuk menambah stok yang digunakan atau untuk perluasan pabrik.

Dornbusch & Fischer berpendapat bahwa investasi adalah permintaan barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi atau pendapatan di masa mendatang

Persyaratan umum pembangunan ekonomi suatu negara menurut Todaro (2000) adalah:

- (1) Akumulasi modal, termasuk akumulasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia;
- (2) Perkembangan penduduk yang dibarengi dengan pertumbuhan tenaga kerja dan keahliannya;
- (3) Kemajuan teknologi.

Akumulasi modal akan berhasil apabila beberapa bagian atau proporsi pendapatan yang ada ditabung dan diinvestasikan untuk memperbesar produk

(output) dan pendapatan di kemudian hari. Untuk membangun itu seyogyanya mengalihkan sumber-sumber dari arus konsumsi dan kemudian mengalihkannya untuk investasi dalam bentuk "*capital formation*" untuk mencapai tingkat produksi yang lebih besar. Investasi di bidang pengembangan sumberdaya manusia akan meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia, sehingga menjadi tenaga ahli yang terampil yang dapat memperlancar kegiatan produktif.

Menurut Sadono Sukirno (2002) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Suryana (2000) menyatakan bahwa kekurangan modal dalam Negara berkembang dapat dilihat dari beberapa sudut:

- (1) Kecilnya jumlah mutlak kapita material;
- (2) Terbatasnya kapasitas dan keahlian penduduk;
- (3) Rendahnya investasi netto.

Akibat keterbatasan tersebut, negara-negara berkembang mempunyai sumber alam yang belum dikembangkan dan sumber daya manusia yang masih potensial. Oleh karena itu untuk meningkatkan produktivitas maka perlu mempercepat investasi baru dalam barang-barang modal fisik dan pengembangan sumberdaya manusia melalui investasi di bidang pendidikan dan pelatihan.

Hal ini sejalan dengan teori perangkap kemiskinan (*vicious circle*) yang berpendapat bahwa: (1) ketidakmampuan untuk mengarahkan tabungan yang cukup, (2) kurangnya perangsang untuk melakukan penanaman modal, (3) taraf pendidikan, pengetahuan dan kemahiran yang relatif rendah merupakan tiga faktor utama yang menghambat terciptanya pembentukan modal di Negara berkembang.

Teori Harrod-Domar mengemukakan bahwa model pertumbuhan ekonomi yang merupakan pengembangan dari teori Keynes. Teori tersebut menitikberatkan pada peranan tabungan dan industri sangat menentukan dalam pertumbuhan ekonomi daerah (Lincoln Arsyad, 1997).

Beberapa asumsi yang digunakan dalam teori ini adalah bahwa:

- (1) Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal yang ada di masyarakat digunakan secara penuh.
- (2) Dalam perekonomian dua sektor (Rumah Tangga dan Perusahaan) berarti sektor pemerintah dan perdagangan tidak ada
- (3) Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik original (nol)
- (4) Kecenderungan untuk menabung (*Marginal Propensity to Save = MPS*) besarnya tetap, demikian juga ratio antar modal dan output (*Capital Output Ratio = COR*) dan rasio penambahan modal-output (*Incremental Capital Output Ratio*)

Teori ini memiliki kelemahan yakni kecendrungan menabung dan ratio penambahan modal-output dalam kenyataannya selalu berubah dalam jangka panjang. Demikian pula proporsi penggunaan tenaga kerja dan modal tidak konstan, harga selalu berubah dan suku bunga dapat berubah akan mempengaruhi investasi.

Dalam model pertumbuhan endogen dikatakan bahwa hasil investasi akan semakin tinggi bila produksi agregat di suatu negara semakin besar. Dengan diasumsikan bahwa investasi swasta dan publik di bidang sumberdaya atau modal manusia dapat menciptakan ekonomi eksternal (eksternalitas positif) dan memacu produktivitas yang mampu mengimbangi kecenderungan ilmiah penurunan skala hasil. Meskipun teknologi tetap diakui memainkan peranan yang sangat penting, namun model pertumbuhan endogen menyatakan bahwa teknologi tersebut tidak perlu ditonjolkan untuk menjelaskan proses terciptanya pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Implikasi yang menarik dari teori ini adalah mampu menjelaskan potensi keuntungan dari investasi komplementer (*complementary investment*) dalam

modal atau sumberdaya manusia, sarana prasarana infrastruktur atau kegiatan penelitian. Mengingat investasi komplementer akan menghasilkan manfaat personal maupun sosial, maka pemerintah berpeluang untuk memperbaiki efisiensi alokasi sumberdaya domestik dengan cara menyediakan berbagai macam barang publik (sarana infrastruktur) atau aktif mendorong investasi swasta dalam industri padat teknologi dimana sumberdaya manusia diakumulakannya. Dengan demikian model ini menganjurkan keikutsertaan pemerintah secara aktif dalam pengelolaan investasi baik langsung maupun tidak langsung.

Investasi swasta di Indonesia dijamin keberadaannya sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Berdasarkan sumber dan kepemilikan modal, maka investasi swasta dibagi menjadi penanaman modal dalam negeri dan asing.

Dengan semakin besarnya investasi pemerintah pada barang publik maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan sektor pertumbuhan sektor swasta dan rumah tangga dalam mengalokasikan sumberdaya yang ada di suatu daerah. Hal ini pada akhirnya akan menyebabkan makin meningkatnya PDRB.

3.5 Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Total pengeluaran pemerintah merupakan penjumlahan keseluruhan dari keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintahan (pusat – propinsi – daerah).

Pada masing-masing tingkatan dalam pemerintahan ini dapat mempunyai keputusan akhir – proses pembuatan yang berbeda dan hanya beberapa hal pemerintah yang di bawahnya dapat dipengaruhi oleh pemerintah yang lebih tinggi (Lee Robert, Jr and Ronald W. Johnson, 1998). Oleh karena itu dalam memahami berbagai pengaturan pendanaan bagi pemerintah pusat (daerah) maka harus mengetahui keragaman fungsi yang dibebankannya. Fungsi tersebut adalah :

- (1) Fungsi penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan kemasyarakatan;

- (2) Fungsi pengaturan, yakni merumuskan dan menegakkan pusat perundangan;
- (3) Fungsi pembangunan, keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam bentuk-bentuk kegiatan ekonomi dan penyediaan prasarana;
- (4) Fungsi perwakilan, yaitu menyatakan pendapat daerah di luar bidang tanggungjawab eksekutif;
- (5) Fungsi koordinasi, yakni melaksanakan koordinasi dan perencanaan investasi dan tata guna tanah regional (daerah).

Menurut Arndt (1998) argumentasi mengenai kebijakan publik dalam kaitan dengan kebijakan pengeluaran pemerintah didasarkan pada situasi bahwa pasar tidak bisa berperan sendiri mengaktifkan mobilisasi aktivitas ekonomi terutama untuk mencapai efisiensi .

Adanya pengeluaran publik disebabkan adanya kegagalan pasar. Adapun menurut Rao (1998) kegagalan pasar tersebut disebabkan karena : (1) Tidak semua barang dan jasa diperdagangkan, (2) Barang-barang yang menyebabkan eksternalitas dalam produksi maupun konsumsi memaksa suatu pertentangan antara harga pasar dengan penilaian sosial dan pasar, dan pasar tidak bisa memastikan untuk memenuhi kondisi yang diinginkan. (3) Beberapa barang mempunyai karakteristik *increasing returns to scale*. Dalam kondisi monopoli alami seperti itu masyarakat dapat memperoleh harga lebih rendah dan output lebih tinggi apabila pemerintah berperan sebagai produsen atau ada subsidi pada sektor swasta untuk menutup biaya karena berproduksi secara optimal. (4) Informasi asimetri antara produsen dan konsumen di bidang jasa seperti asuransi sosial dapat memberi peningkatan moral *hazard* dan pemilihan kurang baik Oleh karena itu intervensi negara diperlukan agar menjamin pendistribusian kembali pendapatan.

Mundle (1998) berpendapat bahwa kemajuan teori dan studi empiris mengenai intervensi kebijakan publik dalam pengembangan manusia mencerminkan tumbuhnya perhatian masyarakat terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan pembangunan sosial.

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sadono Sukirno, 2002) yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur

jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

3.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian ini didasarkan pada model pertumbuhan ekonomi Neo Klasik (*Solow Neo Classical Growth*), maka fungsi produksi agregat standar yang dipakai :

$$Y = A^{ent} \cdot K^{\alpha} \cdot L^{1-\alpha} \dots\dots\dots(1)$$

Y = Produk Domestik Bruto

K = stok modal fisik dan modal manusia

L = tenaga kerja non terampil

A = konstanta yang merefleksikan tingkat teknologi dasar

Dalam penelitian ini Pertumbuhan ekonomi Propinsi Bangka Belitung sebagai (Y); pertumbuhan stok modal dilihat melalui : (1) realisasi nilai penanaman modal (PMDN) ,(2) pengeluaran pemerintah daerah (EXPD); Tenaga kerja dilihat dengan jumlah Angkatan Kerja (AK) sehingga diperoleh persamaan :

$$Y = f(\text{PMDN}, \text{AK}, \text{EXPD}) \dots\dots\dots(2)$$

Dari persamaan (1) dan (2) diperoleh :

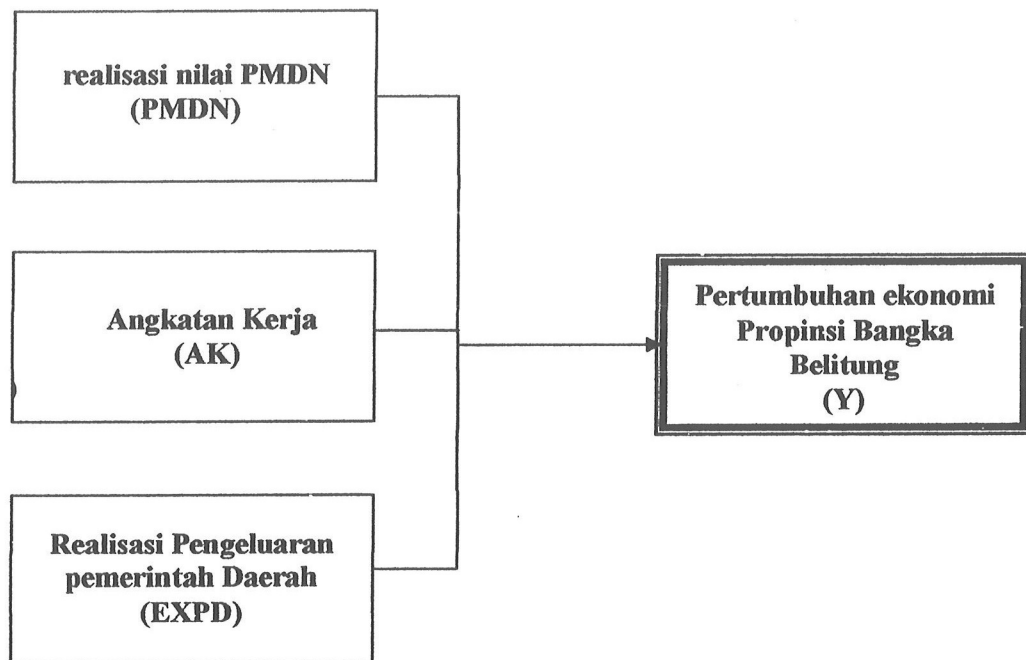
$$Y = A \text{ PMDN}^{\beta 1} \text{ AK}^{\beta 2} \text{ EXPD}^{\beta 3} \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan :

PMDN	= Realisasi Penanaman Modai Dalam Negeri
AK	= Angkatan Kerja
EXPD	= Total pengeluaran pemerintah daerah
A	= konstanta
$\beta 1, \beta 2, \beta 3$	= koefisien

Nilai realisasi PMDN, jumlah angkatan kerja dan pengeluaran pemerintah daerah di Propinsi Bangka Belitung selama periode pengamatan 2007-2010

dijadikan variabel-variabel bebas yang secara parsial atau bersama-sama diduga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Propinsi Bangka Belitung. Skema hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1

Skema Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Variabel-Variabel Yang Mempengaruhinya

3.7 Hipotesis

1. Diduga realisasi nilai PMDN berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
2. Diduga jumlah angkatan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
3. Diduga realisasi pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

BAB IV

TUJUAN PENELITIAN

4.1 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh realisasi nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Bangka Belitung.
2. Menganalisis pengaruh jumlah angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Bangka Belitung.
3. Menganalisis pengaruh jumlah pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Propinsi Bangka Belitung.

BAB V

METODOLOGI PENELITIAN

5.1 Definisi Operasional Variabel

Beberapa definisi operasional variabel dalam penelitian ini memiliki batasan sebagai berikut :

- a. **Produk Domestik Bruto** adalah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa oleh berbagai sektor ekonomi di suatu daerah dalam waktu tertentu (Rupiah/tahun). Data PDRB digunakan adalah PDRB Propinsi Bangka Belitung tanpa migas. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun. PDRB harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa Data PDRB dikeluarkan oleh BPS dan dinyatakan dalam satuan rupiah
- b. **Pertumbuhan ekonomi** : adalah perubahan relatif nilai riil Produk Domestik Bruto (PDRB) di Propinsi Bangka Belitung dinyatakan dalam satuan persen
Tingkat pertumbuhan ekonomi dalam suatu tahun tertentu (tahun t) dapat ditentukan dengan menggunakan formula sebagai berikut (Sadono Sukirno, 2002)

$$g_t = \frac{Y^r_t - Y^r_{t-1}}{Y^r_{t-1}} \times 100\%$$

Ket:

- | | |
|-------------|---|
| g_t | = tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun t (%) |
| Y^r_t | = pendapatan nasional (PDRB) riil pada tahun t (Rp) |
| Y^r_{t-1} | = pendapatan nasional (PDRB) pada tahun sebelumnya (Rp) |
- c. **Angkatan Kerja** adalah jumlah penduduk usia kerja (berusia 10 tahun ke atas) yang bekerja, yaitu melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang/jasa secara kontinu paling sedikit satu jam dalam seminggu (BPS, 2010) di Propinsi Bangka Belitung, dinyatakan dalam satuan orang
 - d. **Realisasi nilai PMDN** adalah realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Propinsi Bangka Belitung, dinyatakan dalam satuan Rupiah

- e. **Pengeluaran pemerintah daerah** adalah realisasi total belanja daerah di Pemerintah Propinsi Bangka Belitung, dinyatakan dalam satuan Rupiah.

5.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Propinsi Bangka Belitung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Bangka Belitung serta sumber lain yang terkait dengan penelitian ini. Secara rinci data yang dipergunakan :

1. **Pertumbuhan Ekonomi** : menggunakan data tentang pertumbuhan PDRB Propinsi Bangka Belitung. Data yang digunakan adalah data tahun 2007 s/d 2010, dinyatakan dalam persen (%).
2. **Variabel realisasi nilai PMDN**: menggunakan data realisasi nilai penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Propinsi Bangka Belitung, dinyatakan dalam juta rupiah.
3. **Variabel Angkatan Kerja**: menggunakan data jumlah penduduk di Propinsi Bangka Belitung berusia 10 tahun ke atas yang bekerja , dinyatakan dalam satuan orang.
4. **Variabel pengeluaran pemerintah**: menggunakan data realisasi total belanja daerah Pemerintah Propinsi Bangka Belitung, dinyatakan dalam juta rupiah.

Data yang digunakan adalah data sekunder selama periode tahun 2007 s/d 2010.

Sumber data yang digunakan :

1. Bangka Belitung dalam Angka tahun 2007 s/d 2010 BPS dan Bappeda Bangka Belitung;
2. PDRB Propinsi Bangka Belitung 2007 s/d 2010;
3. Angkatan Kerja Indonesia tahun 2007 s/d 2010;
4. Berita Resmi Statistik Propinsi Bangka Belitung, berbagai edisi terbitan;
5. Survey Penduduk Antar Sensus (Supas) berbagai tahun penerbitan;

5.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dari instansi, lembaga atau sumber-sumber lain yang relevan. data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kuantitatif regresi berganda.

5.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan/ hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda.

5.4.1 Analisa Kuantitatif

Alat analisa yang dipakai untuk mengetahui pengaruh variabel realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN), jumlah angkatan kerja (AK) dan realisasi jumlah pengeluaran pemerintah (EXP) terhadap pertumbuhan ekonomi adalah dengan menggunakan analisis regresi berganda.

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi ketergantungan variable dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variable penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati, 2003). Teknik estimasi variabel dependen yang digunakan adalah *Ordinary Least Square* (OLS) yaitu mengestimasi garis regresi dengan jalan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut (Imam Ghazali, 2005).

5.4.1.1 Model Persamaan

Spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model pertumbuhan ekonomi Neo Klasik Solow (*Neoclassical Growth Model*), dengan fungsi produksi agregat standar :

$$Y = Ae^{\mu t} \cdot K^{\alpha} \cdot L^{1-\alpha} \dots\dots\dots(3)$$

$$Y = f(\text{PMDN}, \text{AK}, \text{EXPD}) \dots\dots\dots(4)$$

Model ekonometrika (Gujarati, 2003) :

$$Y = \beta_1 + \beta_2 \text{ PMDN} + \beta_3 \text{ AK} + \beta_4 \text{ EXPD} + e \dots\dots\dots(5)$$

Dari persamaan (4) dan (5) diperoleh :

$$Y = A \text{ PMDN}^{\beta_1} \text{ AK}^{\beta_2} \text{ EXPD}^{\beta_3} \dots\dots\dots(6)$$

dimana:

Y = Pertumbuhan ekonomi

L_PMDN = Logaritma Realisasi nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

L_AK = Logaritma jumlah angkatan kerja

L_EXP	= Logaritma pengeluaran pemerintah daerah
B1	= intersep
β_2	= koefisien investasi dalam negeri (PMDN)
β_3	= koefisien angkatan kerja (AK)
β_4	= koefisien pengeluaran pemerintah daerah (EXP)

5.4.1.2 Pengujian Hasil Persamaan Regresi

a. *Goodness of Fit* Suatu Model

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodness of fit* suatu model persamaan regresinya. Pengukuran *goodness of fit* tersebut dapat dilakukan melalui nilai statistik t, nilai statistik F dan koefisien determinasi. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima.

(1) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t statistik dengan t tabel. Dalam pengujian ini dilakukan dengan uji 2 sisi (*two tail test*) dengan tingkat kepercayaan 95 % atau $\alpha=5\%$ dengan hipotesis $H_0:\beta_0=\beta_1=\beta_2=0$ dan $H_a: \beta_0\neq\beta_1\neq\beta_2\neq 0$.

(2) Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F digunakan untuk menguji apakah secara statistik bahwa koefisien regresi dari variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang bermakna dengan membandingkan nilai probabilitas (F-statistik) dengan F tabel, dengan ketentuan jika F Statistik > F tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama, dengan formulasi hipotesis sebagai berikut :

$H_0:\beta_0=\beta_1=\beta_2=0$, variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. $H_a:\beta_0\neq\beta_1\neq\beta_2\neq 0$, variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

(3) Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (dependen). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

Secara umum koefisien untuk data silang (*cross section*) relatif lebih rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan data runtut waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

b. Pengujian Model dengan Asumsi Klasik

Pengujian model terhadap asumsi klasik diberlakukan pada persamaan struktural yang meliputi uji multikolineritas, heteroskedasitas dan autokorelasi.

(1) Uji Multikolineritas

Multikolineritas, menurut Frisch dikemukakan bahwa suatu model regresi dikatakan terkena multikolineritas bila terjadi hubungan linier yang *perfect atau exact* di antara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi. Akibatnya akan kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang dijelaskan.

Terjadinya multikolineritas yang rawan pada model regresi bias dideteksi keberadaannya bila R^2 dari auxiliary regression melebihi R^2 regresi keseluruhan antara variabel tidak bebas dengan variabel bebas model yang diteliti. Selain itu jika nilai *varian inflation factor* (VIF) lebih besar dari 10 maka variabel bebas tersebut memiliki persoalan multikolineritas.

(2) Uji Heteroskedasitas

Heteroskedasitas merupakan fenomena terjadinya perbedaan varian antar seri data. Heteroskedasitas muncul apabila nilai varian dari variabel tak bebas (Y_i) meningkat sebagai meningkatnya varian dari variabel bebas (X_i), maka varian dari Y_i adalah tidak sama. Gejala heteroskedasitas lebih sering dalam data *cross*

section dari pada *time series*. Selain itu juga sering muncul dalam analisis yang menggunakan data rata-rata. Untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas digunakan metode grafik *scatter plot*, uji White, dimana apabila nilai probabilitas (*p value*) observasi R^2 lebih besar dibandingkan tingkat resiko kesalahan yang diambil (digunakan $\alpha = 5\%$), maka residual digolongkan homoskedastisitas.

(3) Uji Autokorelasi

Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data *time series*) atau ruang (seperti dalam data cross section). Autokorelasi pada umumnya lebih sering terjadi pada data *time series* walaupun dapat juga terjadi pada data cross section. Dalam data *time series* observasi diurutkan menurut urutan waktu secara kronologis. Maka dari itu besar kemungkinan akan terjadi interkorelasi antara observasi yang berurutan, khususnya kalau interval antara dua observasi sangat pendek. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dilakukan uji Lagrange Multiplier (*LM test*) dimana apabila probabilitas observasi $R^2 > \alpha$ (5 %), maka bebas dari autokorelasi

(4) Uji Linearitas

Uji terhadap linieritas berguna untuk mengetahui kebenaran bentuk model empiris yang digunakan dan menguji variabel yang relevan untuk dimasukkan dalam model empiris. Dengan kata lain uji linier bermanfaat untuk mengetahui adanya kesalahan dalam spesifikasi model. Uji linier yang digunakan adalah Ramsey, dimana kriterianya bila probabilitas F hitung $> \alpha$ (5 %), maka spesifikasi model sudah benar.

(5) Uji Normalitas

Uji normalitas untuk mengetahui normal tidaknya distribusi factor gangguan (*residual*) . Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik adalah dengan grafik histogram dan melihat *normal probability plot* yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Sedangkan uji statistik dilakukan dengan melihat nilai *kurtosis* dan *skewness* dari residual.

BAB VI

JADWAL PENELITIAN

6.1 Jadwal Penelitian

Schedule Penelitian

No	Kegiatan	Oktober	November	Desember	Januari
1	Pembuatan Proposal	■			
2	Pengambilan Data		■		
3	Pengolahan Data			■	
4	Pembuatan Hasil Penelitian				■
5	Pembuatan Laporan				■

BAB VII

PERSONALIA PENELITIAN

7.1 Personalia Penelitian

1.	Ketua Peneliti	:	
	a. Nama Lengkap	:	Dr. Budi Permana
	b. Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
	c. NIP/NPD	:	
	d. Disiplin Ilmu	:	Manajemen
	e. Pangkat/Golongan	:	
	f. Jabatan	:	Dosen Tetap
	g. Fakultas/Jurusan	:	Ekonomi/ Manajemen
	h. Waktu Pelaksanaan	:	24 Jam / minggu
2.	Anggota Peneliti	:	
	a. Jumlah Anggota	:	4 Orang
3	Tenaga Laborn/Teknisi	:	2 Orang
4	Pekerja Lapangan/Pencacah	:	-
5	Tenaga Administrasi	:	-

BAB VIII
BIAYA PENELITIAN

8.1 Biaya Penelitian

No	Keterangan	Quantity	Satuan	Harga	Jumlah
1	Barang Habis Pakai				
	a. ATK	1	Paket	500,000	500,000
	b. Tinta printer	2	Buah	150,000	300,000
	c. Kertas	5	Rim	40,000	200,000
	d. Foto copy	1	Paket	750,000	750,000
	e. Flash Disk	2	Buah	250,000	500,000
2	Pembuatan Proposal	1	Paket	500,000	500,000
3	Pengambilan Data				
	a. Perizinan	1	Paket	2,000,000	2,000,000
	b. Pengambilan Data	1	Paket	1.500,000	1.500,000
	c. Komunikasi	1	Paket	500,000	500,000
4	Tim Pengolahan Data	6	Orang	500,000	3,000,000
5	Pembelian Buku Pustaka	5	Buku	100,000	500,000
6	Perjalanan	2	Kali	2.000,000	4,000,000
7	Seminar Hasil Penelitian	1	Paket	750,000	750,000
8	Laporan	8	Paket	250,000	2,000,000
Total					17.000.000

Terbilang : Tujuh Belas Juta Rupiah Rupiah

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. 1999. **Ekonomi Pembangunan**. Edisi Keempat. STIE YKPN Yogyakarta
- Boediono. 1982. **Ekonomi Makro**. Yogyakarta: BPFE
- Ghozali, Imam, 2005. **Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar, 2003. *Basic Econometrics*, Fourth Edition, International Edition, Mc Graw-Hill, Printed in Singapore.
- Meier, G.M. 1995. **Leading Issue in Economic Development**. 6th Ed, New York: Oxford University Press
- Mankiw, Gregory. 2003. **makroekonomi**, Ed. 5, Jakarta: Erlangga
- Payaman J. Simanjuntak. 1998. **Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia**, Ed. 2. Jakarta: LPFE-UI
- Ranis, Gustav. et. al. 2000. Economic Growth and Human Development. **World Development** Vol.28, No.2, pp.197-219, 2000
- Samuelson, Paul A. dan Nordhaus, William D., 2005. *Economics*, Eighteenth Ed., McGraw-Hill, 2005 (International Edition).
- Suryana, 2000. **Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan**. Penerbit Salemba Empat Edisi Pertama.
- Soelistyo, Sudarsono dan A. Sudarman. 1981. Prospek Kesempatan Kerja dan Pemerataan Pendapatan dalam Repelita III, dalam Thee Kian Wie (Ed.), **Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan**. Jakarta: Lembaga Peneliti, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1981, hlm: 53-77
- Sadono Sukirno. 2002. **Pengantar Teori Makro Ekonomi**. Ed.2, Jakarta: Rajawali Pers
- Sukirno, Sadono. 2000 **Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru**. Raja Grafindo Pustaka
- Todaro, M. 2000. **Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga**. Ed.7, Jakarta: Erlangga